

DAFTAR PUSTAKA

- Aliah.Hamzah.Nasir.2019.*Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Terhadap PAD Aceh*.Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia 33.Vol.6 No.1.
- Atteng.Kalangi,Samual.2019.*Kontribusi Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sulawesi Utara*.Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi.Vol.19 No.2.
- Auliah.Sapiri.Idris.2018. *Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Takalar*.Jurnal Riset Edisi XXVI.Vol.4 No.3.
- Ferdiyansyah.2020. *Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dengan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Sebagai Pemoderasi*.Inventory Jurnal Akuntansi.Vol.4 No.2.
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Humas Jabar.2017. *Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Barat*. Bandung : BAPPEDA Jabar.
- Haryadi.Kamaruddin.Hamdani.2019.*Analisis Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Nusa Tenggara Barat*.Jurnal Ekonomi Bisnis Vol.16 No.2.
- Nahumury.2018. *Pengaruh Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Merauke*.Musamus Journal Of Economics Development.Vol. 1 No.10.
- Rizal & Hidayah.2018. *Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di SAMSAT Aceh Timur terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Aceh*.Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis.Vol.9 No.1.
- Samudra, A. A. 2015. *Perpajakan di Indonesia : Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Saputra.Putri.2020.*Pengaruh PKB, BBNKB, Dan PBBKB Terhadap PAD Provinsi Bangka Belitung*.Jurnal IKRA-ITH Ekonomika Vol.3 No.3.

- Savitri.Anggraeni.2021.*Analisis Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Timur*.Jurnal Ilmiah Bisnis dan Perpajakan.Vol.3 No.1.
- Sekaran, Uma dan Roger Bougie. (2017), *Metode Penelitian Bisnis*, Edisi 6, Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Sugiyono.2015. *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: CV Alfabeta.
- Suharyadi.Martiwi.Karlina.2019.*Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Pada BPRD Provinsi DKI Jakarta*. E-Journal BSI Index Moneter.Vol.6 No.2.
- Sujarweni V.Wiratna.2019. *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi Pendekatan Kuantitatif*. PUSTAKA BARU PRESS, Yogyakarta.
- PPID BAPENDA Jawa Barat. *Data PKB, BBNKB, dan PBBKB Provinsi Jawa Barat Kabupaten dan Kota*.Kota Bandung.
- Data APBD dari Kemenkeu. *Data PAD Provinsi Jawa Barat Kabupaten dan Kota*.Portal Data.
- BAPENDA.*Definisi Bapenda*.Bapenda Lombok Utara.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2001 tentang harga jual eceran bahan bakar minyak dalam negeri.
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 1 angka 10.
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 1 angka 64.
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 2 angka (1) dan (2).
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tantang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 1 angka 18.
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tantang Perimbangan Keuangan Antara

- Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 5 angka 2.
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 6 angka 1.
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Pasal 1 angka 10.
- Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Pasal 1 angka 12.
- Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Pasal 3.
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Pasal 4.
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi (PDRD) Pasal 6.
- Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 angka 14.
- Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Pasal 9.
- Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Pasal 9 angka 3.
- Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Pasal 10.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak dan retribusi daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- Undang-Undang Nomo 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Pasal 16.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Pasal 17.
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Pasal 1 Angka 12 dan 13.
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Pasal 3.
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Pasal 6.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Pasal 9.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Pasal 1 Angka 15 dan 16.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 16 dan 17.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 19.

